

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2022



INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA



KATA PENGANTAR

Kami mengawali penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini dengan *bismillaahir rohmaa nirrohiim* dan ungkapan syukur ke hadirat Allah SWT dengan harapan agar di akhir Renstra Tahun 2017-2022 ini kerja Inspektorat Kota Yogyakarta dicatat sebagai ibadah yang tidak terputus serta selalu diberkahi oleh Allah SWT. Aamiin.

Rencana kerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Yogyakarta. Rencana kerja SKPD merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian rencana kerja Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Inspektorat Kota Yogyakarta, dan RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022.

Rencana kerja dibuat setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan berlaku untuk satu tahun tertentu. Rencana Kerja Tahun 2022 Inspektorat Kota Yogyakarta disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan rencana kerja Inspektorat Kota Yogyakarta tahun 2022 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga tahun terakhir rencana kerja Renstra Tahun 2017-2022 ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Juli 2021

Inspektorat Kota Yogyakarta

Inspektur

Drs. MARYOTO, M.M

NIP 19610801 198503 1 010

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/349/SE/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Walaupun masih dalam pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tapi Renja Inspektorat Tahun 2022 sebagai akhir Renstra Tahun 2017-2022 tetap semangat untuk disusun sebagai acuan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok fungsinya, berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dan Reviu Renstra.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah, mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu, serta memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disusun melalui proses Rapat koordinasi terbatas dengan melibatkan stakeholder internal Inspektorat Kota Yogyakarta.

Renja Inspektorat terkait dengan cita 2 dan cita 4 dari 9 agenda Pembangunan Nasional (Nawacita) yang menjadi dasar penyusunan Prioritas Nasional yaitu :

Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; serta

Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dari Rancangan Prioritas Nasional nomor 2 dan 4 yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih , efektif, demokratis, dan terpercaya.

Disamping itu Renja Inspektorat juga terkait dengan Prioritas pembangunan Kota Yogyakarta yang disusun berdasar tema dan prioritas pembangunan Nasional dan Pemerintah DIY yaitu prioritas ke 7 yaitu : Kinerja aparatur dan birokrasi.

Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam bentuk Renja Perangkat Daerah setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun 2022 yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat wajib menyusun Rencana Kerja SKPD untuk mendukung salah satu prioritas perencanaan pembangunan daerah yaitu Kinerja Aparatur dan Birokrasi agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta ada keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk bahan tindak lanjut penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Susunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta;

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 dan 44 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat dan ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
17. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/349/SE/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja. Juga sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Inspektorat Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2022 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk :

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kota Yogyakarta.
- b. Sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Inspektorat Kota Yogyakarta untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat yang memuat program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU terdiri dari :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH terdiri dari :

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021 yang sedang berjalan, serta pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2020.

Tahun 2021 merupakan tahun **keempat** pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun 2017-2022, sehingga sudah ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Capaian Program Tahun 2017 sd Tahun 2020 sebagai berikut :

Nama Program	Target dan Realisasi Tahun 2017	Target dan Realisasi Tahun 2018	Target dan Realisasi Tahun 2019	Target dan Realisasi Tahun 2020
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur	Target : 80% Realisasi : 97%	Target : 91% Realisasi : 100%	Target : 91% Realisasi : 100%	Target : 91% Realisasi : 100%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan fisik	Target : 80% Realisasi : 96%	Target : 91% Realisasi : 100%	Target : 91% Realisasi : 100%	Target : 91% Realisasi : 100%

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan sosial ekonomi budaya	Target : 80% Realisasi : 95%	Target : 91% Realisasi : 100%	Target : 91% Realisasi : 80%	Target : 91% Realisasi : 100%
Program peningkatan dan evaluasi pengawasan ada 2 Indikator.	- 0% - 0	- T : 83% R : 88% - T : level 2 (untuk 3 elemen) R : level 3 (untuk 4 elemen)	- T : 85% R : 91,90% - T : level 3 (untuk 3 elemen) R : level 3 (untuk 6 elemen)	- T : 87% R : 98,39% - T : level 3 (untuk 6 elemen) R : level 3 (untuk 6 elemen)

Pada Tahun 2021 sesuai Permendagri No 90 Tahun 2019, maka Inspektorat ada reviu Program menjadi 2 program.

Reviu target program sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta No. 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Perwal Kota Yogyakarta No. 105 Tahun 2017 Tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Pada Renja Tahun 2022 sebagai akhir pelaksanaan Renstra Tahun 2017-2022 maka kami lakukan evaluasi terhadap Program dari awal Renstra Tahun 2017 sd Tahun 2020 yang sudah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi pada tahun 2017 dan 2018 target program tercapai semuanya, namun pada tahun 2019 ada 2 program yang realisasi programnya belum tercapai dikarenakan pelaksanaan pemeriksaan di laksanakan pada akhir tahun 2019 sehingga tindak lanjut rekomendasi oleh OPD sudah melampaui tahun anggaran 2019, atau awal tahun 2020 baru ditindaklanjuti oleh OPD.

Faktor Pendorong : Dilakukan komunikasi dengan auditan, ada komitmen OPD untuk menyelesaikan target tindak lanjut dengan BA kesepakatan hasil audit/penegasan.

Faktor Penghambat : adanya beberapa OPD yang belum menindaklanjuti rekomendasi saat dilakukan audit, karena saat pemeriksaan dilakukan di akhir tahun dan OPD masih harus mengerjakan banyak hal, hasil pemeriksaan di akhir Tahun membawa dampak tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan melampaui tahun anggaran 2019.

Solusinya dan evaluasi adalah agar mencermati kembali PKPT untuk tidak melaksanakan pemeriksaan di akhir tahun, atau merevisi perencanaan pemeriksaan di PKPT sehingga tidak terulang kembali pemeriksaan berikutnya.

Di Tahun 2020 ada 1 program yang tidak tercapai targetnya karena ada OPD untuk menyelesaikan hasil rekomendasi pemeriksaan membutuhkan waktu lama karena terkait kebijakan, sehingga sampai tahun anggaran berakhir belum selesai di tindaklanjuti oleh OPD tersebut.

Faktor Penghambat : hasil rekomendasinya terkait kebijakan di OPD membutuhkan waktu yang lama.

Solusinya dan evaluasi adalah sudah dilakukan komunikasi oleh Inspektorat secara intensif, mengadakan koordinasi dan monitoring ke OPD terkait tindak lanjutnya.

Pada Tahun 2021 ini akan mengusulkan untuk diadakan reviu terhadap Indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi untuk Renja Tahun 2022 agar sesuai tupoksi dengan kelembagaan Inspektorat yang baru yaitu Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal di pindah menjadi indikator pada Program Penyelenggaraan Pengawasan. Alasan Reviu Karena 1 program dengan indikator yg sama tidak boleh di ampu lebih dari 1 bidang, maka yg mengampu PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI yang ada kegiatan Kapabilitas APIP nya, yaitu Bidang Perekonomian dan Kesra. serta output Pemantauan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal ada di Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset.

Adapun Target Program Tahun 2021 dan Rencana Reviu Indikator Program Tahun 2022 sebagai berikut :

Nama Program	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Ada 4 Indikator dengan Target : 91%	Ada 5 Indikator dengan Target : 91%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Ada 2 Indikator dengan Target : 1. 89% 2. level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	Ada 1 Indikator : dengan Target : level 3 (untuk 6 elemen penilaian)

Secara rinci realisasi anggaran Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung
Anggaran Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan tunjangan sebesar Rp.4.172.025.000,- terealisasi Rp.3.949.900.292,- atau 94,68%.
- b. Belanja Langsung
Anggaran Belanja Langsung terdiri dari 8 Program dan 14 kegiatan Rp 799.049.436,- terealisasi Rp782.118.479,74 atau 97,88%.

Total Anggaran untuk mendukung operasional kegiatan Inspektorat ditunjang dari satu sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, dengan jumlah perubahan anggaran tahun 2020 adalah Rp.4.971.074.436,- terealisasi sejumlah Rp.4.732.018.772,- atau tercapai 95,19%.

Pencapaian program dan kegiatan tahun 2021 belum dapat dievaluasi dan diperkirakan karena baru 2 bulan dalam pelaksanaan kegiatan.

Gambaran capaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dan capaian Renstra Perangkat Daerah secara ringkas tercantum pada Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang merupakan hasil evaluasi melalui SIM Monev evaluasi Renja 2020 atau Desk Timbal Balik Pelaksanaan Renja di Triwulan IV.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis kinerja Sasaran strategis Perangkat Daerah yaitu “ Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat “.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus merupakan indikator kinerja sasaran untuk mengukur sasaran strategis Inspektorat tersebut adalah sebagai berikut :

Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti
--

Target dan Realisasi Tahun 2018

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA SASARAN
	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	3,33	3,33	
		Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat	% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	83%	88%	106%

Target dan Realisasi Tahun 2019

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA SASARAN
	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	3,33	Nilai SA mandiri 3,37 (Dalam tahap penilaian oleh BPKP)	
		Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan internal dan eksternal yang meningkat	% (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	85%	91,90%	108%

Perubahan nomenklatur Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra sesuai Perwal Kota Yogyakarta No. 44 Tahun 2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perwal No. 105 Tahun 2017 Tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, Adapun Target Sasaran Tahun 2019 sd 2022 sebagai berikut :

Sasaran sebelum Perubahan	Indikator Sasaran	Target Tahun	Sasaran setelah Perubahan	Indikator Sasaran	Target Tahun
Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan internal dan eksternal yang meningkat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	2019 : 85% 2020 : 87% 2021 : 89% 2022 : 91%	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meningkat	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	2019 : 3.33 2020 : 3.40 2021 : 3.40 2022 : 3.40

Target dan Realisasi Tahun 2019 dan 2020 Setelah Reviu Renstra.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET & REALISASI	TARGET & REALISASI	CAPAIAN KINERJA SASARAN
	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Th : 2019 T : 3,33 R : 3,37	Th : 2020 T : 3,40 R : 3,00	88,24% (Target tidak tercapai)

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran diatas disimpulkan bahwa sasaran yang telah ditetapkan tahun 2020 dari target 3.40 terealisasi 3.00 atau tingkat capaian 88,24% sehingga nilai sasaran yang di targetkan tidak tercapai.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan saran yang harus di tindaklanjuti hasil Quality Assurance dari BPKP Pusat atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta secara berkelanjutan, antara lain :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko dan mengintegrasikan proses pengelolaan risiko dengan proses perencanaan pemerintah daerah.
 - b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang pengelolaan risiko.
 - c. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko melalui identifikasi dan analisa risiko, penyusunan rencana tidak pengendalian (RTP), implementasi RTP, pengomunikasian risiko dan RTP, serta pemantauan dan evaluasi kejadian risiko dan implementasi RTP
2. Mengintruksikan kepada Inspektorat selaku asesor penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP untuk :
 - a. Memperbaiki kelengkapan kertas kerja hasil penilaian maturitas SPIP.
 - b. Memperbaiki substansi atas penjelasan pemenuhan bukti pendukung maturitas penyelenggaraan SPIP pada level yang ditetapkan.
 - c. Melaksanakan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP, antara lain :
 - Peningkatan kualitas pengelolaan risiko.
 - Pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang telah mempertimbangkan hasil penilaian risiko.
 - Pelaksanaan audit kinerja dengan aspek ekonomis, efisien dan efektivitas atas pelaksanaan program strategis.
 - Peningkatan pemahaman atas substansi sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko, sehingga terbentuk pola manajemen risiko yang handal untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Demikian capaian sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat dengan indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern, setelah diadakan penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern oleh BPKP pusat Tahun 2020 dengan hasil nilai 3.00 dari target 3.4 atau tingkat capaian 88,24%.

Adapun data jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN	JUMLAH TEMUAN	JUMLAH REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			%
			Selesai	Dalam Proses	Belum ditindak lanjuti	
Inspektorat Kota	13	24	22	2	0	91,67
Inspektorat DIY	16	28	28	0	0	100
BPKP	19	20	20	0	0	100
Irjen Teknis	0	0	0	0	0	0
BPK	52	52	52	0	0	100
JUMLAH	74	124	122	2	0	98,39

Rumus =	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} = N$
=	$= \frac{122}{124} = 98,39 \%$

Untuk IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang terkait Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah yaitu % temuan BPK yang ditindaklanjuti, pada tahun 2020 tercapai sebesar 100% dengan rumus perhitungan :

Rumus =	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi}} = N$
=	$= \frac{52}{52} \times 100 = 100 \%$

Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan target pada tahun 2020 level 3 (untuk 6 elemen penilaian) hasil penilaian dari BPKP yaitu Level 3 (untuk 6 elemen penilaian) dengan tingkat capaian level 3 penuh namun masih ada beberapa catatan.

Secara ringkas pencapaian kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.2, yaitu Tabel Pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Yogyakarta

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020	TH 2021	TH 2022	TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020	TH 2021	TH 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	Indikator berdasar IKK : Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,25%	100%	100%	100%	<p>Terkait dengan keberhasilan Pemerintah Kota Yogyakarta meraih predikat WTP yang ke sekian kalinya, maka target dan realisasi temuan BPK RI tahun 2020 yang ditindaklanjuti sejumlah 52 TL dan dalam proses 0 TL, maka dari 52 Rekomendasi tsb telah ditindaklanjuti 52 atau 100%.</p> <p>Cara menghitung = 100% rekomendasi yg ditindaklanjuti : 52, jumlah seluruh rekomendasi pada Tahun ybs = 52 rekomendasi di kalikan 100%, dengan rincian 52 selesai, berdasar data s/d akhir Th 2020 (LKIP)</p>
II	Indikator kinerja Sasaran berdasar IKU : % (persentase) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti (Sebelum Reviu)			80,16 %	83%	85%	87%	89%	91%	80.16%	88%	91%	0	0	0	Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Sosial Ekonomi Budaya																Realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang pembangunan sosekbud yang ditindaklanjuti = 26 rekom yg ditl. / 20 (jumlah semua rekom) Realisasi 100% = 2/2X100 Program ini juga berhasil menindaklanjuti semua rekomendasi.
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi			80%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	94.44%	100%	80%	100%	100%	100%	
Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan																
persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal				83%	85%	87%	89%	91%			88%	91%	98,39%	89%	91%	Program ini baru ada tahun 2018 karena berdasar hasil eval diperlukan program baru yang mendukung pencapaian target IKU : % rekom.tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal. Pada tahun 2020 terealisasi 98,39% dari target 87% yaitu 122/124X100%.
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah				Level 2 (6 elemen)	Level 3 (3 elemen)	Level 3 (4 elemen)	Level 3 (5 elemen)	Level 3 (6 elemen)			Level 3 (4 elemen) dengan 2 catatan	Level 3 (untuk 6 elemen)	Level 3 (untuk 6 elemen)	Level 3 (untuk 6 elemen)	Level 3 (untuk 6 elemen)	Program ini juga diperlukan untuk peningkatan kapabilitas APIP sesuai target yang diinstruksikan presiden bahwa APIP di Indonesia 85% mencapai level 3. Pada Tahun 2020 sudah Level 3 (6 elemen) atau Level 3 penuh.
Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai			100%	100%	100%	100%	100%	100%	86,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% capaian program di Internal tercapai semuanya 100%, namun adanya beberapa efisiensi di kegiatan tertentu sehingga capaian keuangan tidak terserap 100%.

	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	<p>Faktor penghambat pencapaian kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kebijakan pengelolaan resiko dan mengintegrasikan proses pengelolaan resiko dengan proses perencanaan pemerintah daerah. 2. Masih rendahnya kompetensi SDM dalam bidang pengelolaan resiko. 3. Belum ada implementasi pengelolaan resiko melalui identifikasi dan analisa resiko, penyusunan rencana tidak pengendalian (RTP), implementasi RTP, pengomunikasian resiko dan RTP, serta pemantauan dan evaluasi kejadian resiko dan implementasi RTP. 4. Memperbaiki pemenuhan bukti pendukung dan pendokumentasian. 															

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya misi ke 7 yaitu : ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih***

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kota Yogyakarta telah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama untuk Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pengawasan Internal yang merupakan program utama Inspektorat dapat tercapai sesuai target namun masih menjadi tantangan kita bersama untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi yang masih tertunda dari rekomendasi BPK RI.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif berbagai solusi telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta.

Keberhasilan Inspektorat Kota Yogyakarta dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin. Komitmen pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Telah ada koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Kota Yogyakarta dengan Inspektorat Propinsi DIY maupun Inspektorat dan Kementrian tingkat pusat karena setiap tahun selalu ada Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan) tingkat Propinsi yang melibatkan semua inspektorat kabupaten kota se Propinsii DIY maupun tingkat Nasional (Rakorwasnas) yang melibatkan seluruh inspektorat provinsi, kabupaten kota dan Irjend Kementrian.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

Isu penting permasalahan berkaitan dengan ketugasan Inspektorat sebagai koordinator pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mendukung terwujudnya Good Governance tersebut adalah belum adanya unsur-unsur/sub unsur yang diperlukan untuk dapat melaksanakan SPIP antara lain masih ada OPD yang belum taat terhadap kebijakan yang memuat metode identifikasi resiko, aksi penanganan resiko, pengendalian resiko sistem informasi, SOP penggunaan sistem informasi, pengamanan atas fasilitas dan aset penting, evaluasi atas ukuran dan indikator kinerja secara periodik.

Masih ada permasalahan lain seperti belum ada rencana pemulihan bila terjadi bencana, masih terdapat kebijakan yang diambil pimpinan belum didasarkan pada hasil penilaian resiko yang sistematis, serta masih adanya rekomendasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang belum ditindaklanjuti dan saran dari BPKP yang perlu ditindaklanjuti di tahun 2021 dan 2022.

Permasalahan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) baik dari segi jumlah maupun kualitas belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan). Dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 80 auditor berdasar hasil analisa jabatan, baru tersedia 40 auditor, dan baru sebagian memiliki sertifikasi sesuai jenjang jabatan fungsional sebagai auditor.

Peluang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

Tema pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan rancangan awal **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta adalah “Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Berbasis Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat”**

Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun **Road map Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 bidang yaitu :**

- a) **Manajemen Perubahan**
- b) **Penataan Perauran Perundang-undangan**
- c) **Penataan dan penguatan organisasi**
- d) **Penataan tatalaksana**
- e) **Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia**
- f) **Penguatan Akuntabilitas**
- g) **Penguatan Pengawasan**
- h) **Peningkatan kualitas pelayanan public.**

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting. Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang berkualitas.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik), yang meliputi unsur meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta meningkatnya profesionalisme SDM aparatur, maka fungsi pengawasan memegang peran penting dan strategis.

Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung sistem pengendalian intern pemerintah.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); semua pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan dan melaksanakan SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu dari 3 Pemda se Indonesia yang menjadi pilot project pelaksanaan SPIP tingkat nasional, BPKP melaksanakan penilaian maturitas SPIP dengan tujuan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan SPIP dan memberi rekomendasi bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah.

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi 5 unsur SPIP yaitu :

- a) Lingkungan pengendalian
- b) Penilaian Risiko
- c) Kegiatan pengendalian
- d) Informasi dan komunikasi
- e) Pemantauan pengendalian intern.

Level maturitas SPIP terdiri dari 6 (enam) tingkat:

-) **Tingkat 0** untuk pemerintah daerah yang sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
-) **Tingkat 1 (Rintisan)**
-) **Tingkat 2 (Berkembang)**
-) **Tingkat 3 (Terdefinisi)**
-) **Tingkat 4 (Terkelola dan terukur)**
-) **Tingkat 5 (Optimum)** instansi telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta tingkat level maturitas SPIP pada tahun 2020 tingkat 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,00, diharapkan nilai maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta dapat semakin meningkat sehingga di tahun 2022 target 3.40 tercapai.

Maka Inspektorat perlu meningkatkan kualitas SDM, program dan kegiatannya agar dapat mencapai hasil yang diharapkan yaitu peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Model Kapabilitas Pengawasan Intern (Internal Audit Capability Model/IA-CM) yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor public.

Dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi 5 (lima) level kapabilitas, yaitu: level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Sampai dengan tahun 2015 dalam kurun 5 tahun terakhir (2010-2014), sebanyak 474 APIP dari 628 APIP (yang terdiri dari 86 APIP Pusat dan 542 APIP Daerah) telah dilakukan *assessment* kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasilnya menunjukkan bahwa 404 APIP atau 85,23% APIP masih berada pada Level 1 (*initial*), 68 APIP atau 14,56% berada pada Level 2 (*infrastructure*) dan hanya 2 APIP atau (0,21%) berada pada Level 3 (*integrated*). Komponen Penilaian self improvement IACM (Internal Audit Capability Model) oleh BPKP terhadap **6 elemen kapabilitas APIP** (yaitu: 1) Peran dan Layanan APIP; 2) Pengelolaan SDM APIP 3) Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Secara Profesional, 4) Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas, 5) Hubungan dan Budaya Organisasi, dan 6) Struktur Tata Kelola.

Berdasarkan arahan Presiden saat Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 13 Mei 2015 maka seluruh APIP secara nasional perlu meningkatkan leveling kapabilitas APIP dengan target untuk 5 tahun ke depan ditargetkan 85% mampu mencapai level 3 dan hanya 1% level 1.

Hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP Pusat tahun 2019 No.SP-2569/D3/04/2019 tanggal 27 Desember 2019 bahwa Inspektorat Kota Yogyakarta berada di level 3 (6 Elemen penuh) dengan demikian target nasional tercapai walaupun masih ada beberapa catatan, dan target akhir renstra tahun 2022 juga sudah tercapai, sehingga tugas berat untuk mempertahankan dan menghilangkan beberapa catatan kurun waktu 2020, 2021 dan 2022 atau dengan kata lain level 3 (6 Elemen penuh) sempurna tanpa catatan. **Namun yang lebih utama adalah isu penting dan strategis untuk mencapai target Sasaran Inspektorat 3.40 di Renja Tahun 2021 dan 2022 dengan optimalisasi pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemkot Yogyakarta membutuhkan stamina yang serius.**

Disamping isu-isu tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta juga menjadi salah satu pilot project LAN terkait laboratorium Inovasi daerah, maka instansi dituntut mengajukan kegiatan yang bersifat inovatif. Sesuai dengan fungsinya sebagai early warning yang lebih bersifat preventif (pencegahan pelanggaran aturan), maka kegiatan yang diusulkan Inspektorat adalah selalu mendorong agar SKPD dapat melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berinovasi. Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (**early warning system**).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adanya perubahan / review terhadap program dan rancangan awal RKPD dari hasil analisis kebutuhan untuk Renja Tahun 2022 antara lain disebabkan karena :

- a) Adanya beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan yang baru.
- b) Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.
- c) Pelaksanaan SIPD yang belum stabil dan masih berubah ubah di dalam aplikasinya.
- d) Hasil evaluasi Gubernur DIY terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta terhadap penanganan covid 19.
- e) Belanja Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan dan kebijakan yang baru dengan menggunakan 4 kode rekening yang berbeda.
- f) Penyesuaian administrasi penatausahaan keuangan menggunakan system yang baru.
- g) Tidak ada lagi belanja bersifat BTL dan BL. .
- h) Belanja Bimtek/Diklat OPD disentralkan di BKPSDM Kota Yogyakarta sesuai Permendagri No. 38 Tahun 2018 pembiayaan pengembangan kompetensi Kab / Kota minimal 0,16% dari Belanja Daerah sehingga kebijakan lokal diklat harus disentralkan di BKPSDM atau Diklat Satu Pintu, sehingga koordinasi semakin panjang.
- i) Pembayaran honor tenaga dan bantuan (Naban) hanya yang mendapat rekomendasi dari TAPD dan menjadi 1 rekening.
- j) Adanya perubahan penambahan dan pengurangan sarana prasarana yang berupa asset dalam rangka tindak lanjut evaluasi gubernur.

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6123 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.

Kegiatan pengawasan dapat mencakup kegiatan audit, pembinaan, pemantauan, evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya seperti pembimbingan, asistensi, konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system).

Untuk melakukan reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 maka perlu dilihat kembali Permendagri No 19 Tahun 2019 yaitu nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyesuaian output, outcome dan anggaran. Adapaun Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Inspektorat Kota Yogyakarta
Tabel 2.3

No.	Rancangan Awal RKPD					No.	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12/)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				9.564.289.903		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			9.564.289.903		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	40.100.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	40.100.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra - Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 	<p>3 dokumen</p> <p>1 BA</p>	2.000.000	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra - Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 	<p>3 dokumen</p> <p>1 BA</p>	2.000.000	Pada Renja Tahun 2022 disesuaikan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Renja Tahun sebelumnya belum ada Forum OPD baru mulai pada perencanaan tahun 2022. Tenaga teknis tidak di sentralkan, masuk di kegiatan.

1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat	- RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	3.500.000	1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat	- RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	3.500.000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	- Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	34.100.000	1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	- Tenaga Teknis 1 orang	12 Bulan	34.100.000	
			- Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen					- Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		
			- Pengelolaan Website OPD	12 bulan					- Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen		
			- Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen					- Pengelolaan Website OPD	12 bulan		
			- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen				- Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen			
								- Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen			

1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Sakip)	1 dokumen	500.000	1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Sakip)	1 dokumen	500.000	Renja Tahun 2020 ini ada penambahan anggaran utk evaluasi SAKIP.
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	8.412.526.295	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	8.412.526.295	Untuk anggaran gaji dan
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN	61 ASN	8.408.048.295	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan ASN	61 ASN	8.408.048.295	TPP/Tunjangan kinerja menjadi 1 sub kegiatan di
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		- Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	500.000	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		- Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	500.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		- Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 Dokumen	500.000	2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		- Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 Dokumen	500.000	
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	498.000	2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	498.000	

2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	500.000	2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	500.000
2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	180.000	2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	180.000
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	1.800.000	2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	1.800.000
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	500.000	2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	500.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	357.334.488	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	357.334.488
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	4.340.000	3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	4.340.000

3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Tulis Kantor - Kertas dan cover (HVS) - Bahan kantor-bahan, suku cadang komputer - Toner printer Cartridge printer - Refill tinta 	<p>67 jenis</p> <p>5 Jenis</p> <p>14 jenis</p> <p>4 buah</p> <p>5 unit</p>	65.088.488	3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Tulis Kantor - Kertas dan cover (HVS) - Bahan kantor-bahan, suku cadang komputer - Toner printer Cartridge printer - Refill tinta 	<p>67 jenis</p> <p>5 Jenis</p> <p>14 jenis</p> <p>4 buah</p> <p>5 unit</p>	65.088.488	
			<ul style="list-style-type: none"> - Mouse - Flashdisk - Kabel HDMI - Peralatan Rumah Tangga/Kantor (Pengharum Mobil, Bendera) - Retribusi Kebersihan 	<p>16 jenis</p> <p>2 unit</p> <p>2 unit</p> <p>12 jenis</p> <p>1 jenis</p>					<ul style="list-style-type: none"> - Mouse - Flashdisk - Kabel HDMI - Peralatan Rumah Tangga/Kantor (Pengharum Mobil, Bendera) - Retribusi Kebersihan 	<p>16 jenis</p> <p>2 unit</p> <p>2 unit</p> <p>12 jenis</p> <p>1 jenis</p>		
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan Penggandaan surat-surat/dokumen	6 jenis 100.000 lembar	32.110.000	3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan Penggandaan surat-surat/dokumen	6 jenis 100.000 lembar	32.110.000	
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Kabar selama 12 bulan - Buku Perundang-undangan 	<p>2 jenis</p> <p>10 buku</p>	5.260.000	3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Kabar selama 12 bulan - Buku Perundang-undangan 	<p>2 jenis</p> <p>10 buku</p>	5.260.000	

3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<ul style="list-style-type: none"> - Makan Minum Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 	<p>162 os</p> <p>13 kali</p>	250.536.000	3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		<ul style="list-style-type: none"> - Makan Minum Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 	<p>162 os</p> <p>13 kali</p>	250.536.000	
			<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa - SPPD Uji Materi 	<p>5 kali</p> <p>3 kali</p> <p>5 kali</p>					<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa - SPPD Uji Materi 	<p>5 kali</p> <p>3 kali</p> <p>5 kali</p>		
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	198.100.000	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	198.100.000	
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		<ul style="list-style-type: none"> - Hard Server - Kursi Kerja - Kursi Kerja Eselon III - Kursi tamu - Lape Tope 	<p>1 unit</p> <p>18 unit</p> <p>2 unit</p> <p>1 unit</p> <p>5 unit</p>	198.100.000	4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		<ul style="list-style-type: none"> - Hard Server - Kursi Kerja - Kursi Kerja Eselon III - Kursi tamu - Lape Tope 	<p>1 unit</p> <p>18 unit</p> <p>2 unit</p> <p>1 unit</p> <p>5 unit</p>	198.100.000	

			<ul style="list-style-type: none"> - PC Komputer All In One - Pembuatan Back Drop Lt.4 - Peningkatan ruang konsultasi - Penyekatan ruang rapat lt.3 - Printer - Printer warna - UPS 	<ul style="list-style-type: none"> 2 unit 2 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit 				<ul style="list-style-type: none"> - PC Komputer All In One - Pembuatan Back Drop Lt.4 - Peningkatan ruang konsultasi - Penyekatan ruang rapat lt.3 - Printer - Printer warna - UPS 	<ul style="list-style-type: none"> 2 unit 2 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit 			
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	394.845.520		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	394.845.520	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Masuk - Surat Keluar - Pengiriman Dokumen - Materai 	<ul style="list-style-type: none"> 5.385 surat 1.769 surat 37 dokumen 550 Lembar 	8.497.000	5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<ul style="list-style-type: none"> - Surat Masuk - Surat Keluar - Pengiriman Dokumen - Materai 	<ul style="list-style-type: none"> 5.385 surat 1.769 surat 37 dokume n 550 Lembar 	8.497.000	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran rekening telepon 	12 bulan***	6.600.000	5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran rekening telepon 	12 bulan***	6.600.000	

5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				379.748.520	5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				379.748.520
			- Jasa Cleaning Service	12 bulan					- Jasa Cleaning Service	12 bulan	
			Jasa Tenaga						Jasa Tenaga Keamanan	12 bulan	
			- Keamanan	12 bulan					- Penyediaan Jasa tenaga Naban	12 bulan	
			- Penyediaan Jasa tenaga Naban	12 bulan					- Penyediaan Jasa tenaga Teknis	12 bulan	
			- Penyediaan Jasa tenaga Teknis	12 bulan					- Sewa/ Pemeliharaan Taman	12 bulan	
			- Sewa/ Pemeliharaan Taman	12 bulan					- Sewa Alat Mesin Foto Copy	12 bulan	
			- Sewa Alat Mesin Foto Copy	12 bulan							
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	161.383.600		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	161.383.600
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	13 unit	104.223.600	6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	13 unit	104.223.600
			- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 4	6 Unit					- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 4	6 Unit	

			- Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 2	13 unit					- Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 2	13 unit	
			- Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 4	6 unit					- Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 4	6 unit	
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	6 unit	9.900.000	6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	6 unit	9.900.000
			- Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/ lapangan roda 4	13 unit					- Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/ lapangan roda 4	1 3 u ni t	
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		- BBM Genset	240 liter	22.260.000	6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		- BBM Genset	240 liter	22.260.000
			- Komputer Laptop	8 unit					- Komputer Laptop	8 unit	
			AC Split	32 unit					AC Split	32 unit	
			Printer	7 unit					Printer	7 unit	

			- Mebelair - Service/Perbaikan Sumur	1 unit 3 kali					- Mebelair - Service/Perbaikan Sumur	1 unit 3 kali		
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		- Pemeliharaan Gedung/Kantor	2 unit	25,000,000	6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		- Pemeliharaan Gedung/Kantor	2 unit	25,000,000	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Yk	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan Aparatur Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal dan Internal	91% 91% 91%	307.640.860	2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Yk	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan Aparatur Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal dan Internal	91% 91% 91%	307.640.860	Pada renja tahun 2022 ini ada perubahan indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan dari 4 Indikator menjadi 5 indikator yaitu ada penambahan 1 indikator di Bidang Keua dan Aset .
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Sarana dan Prasarana	91%					Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Sarana dan Prasarana	91%		

			Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91%					Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91%		
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Tersedianya Laporan/dokumen di Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100%	169.079.360	2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Tersedianya Laporan/dokumen di Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100%	169.079.360	
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Audit Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Laporan Audit Operasional Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Laporan Audit Kinerja Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 	<p>2 LHA</p> <p>2 LHA</p> <p>2 LHA</p>	79.588.110	2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Audit Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Laporan Audit Operasional Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Laporan Audit Kinerja Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 	<p>2 LHA</p> <p>2 LHA</p> <p>2 LHA</p>	79.588.110	

			- Laporan Audit Operasional Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	2 LHA					- Laporan Audit Operasional Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	2 LHA		
			- Laporan Audit Kinerja Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	2 LHA					- Laporan Audit Kinerja Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	2 LHA		
			- Laporan Audit Operasional Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	1 LHA					- Laporan Audit Operasional Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	1 LHA		
			- Laporan Audit Kinerja Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2 LHA					- Laporan Audit Kinerja Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2 LHA		
			- Laporan Audit Operasional Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2 LHA					- Laporan Audit Operasional Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2 LHA		
			- Laporan Evaluasi SAKIP Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	44 LHE					- Laporan Evaluasi SAKIP Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	42 LHE		

			<ul style="list-style-type: none"> - Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - Laporan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 	1 Dokumen 4 Lap					<ul style="list-style-type: none"> - Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - Laporan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 	1 Dokumen 4 Lap		
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Yk	<ul style="list-style-type: none"> - Review DAK Fisik Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Review DAK Fisik Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - Review DAK Fisik Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - Review DAK Fisik Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana - Laporan Review Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah - Laporan Review Penyerapan Anggaran 	3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 4 Lap 4 Laporan	45.000.000	2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Yk	<ul style="list-style-type: none"> - Review DAK Fisik Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Review DAK Fisik Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - Review DAK Fisik Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - Review DAK Fisik Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana - Laporan Review Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah - Laporan Review Penyerapan Anggaran 	3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 4 Lap 4 Laporan	45.000.000	

			<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Evaluasi Tematik Keuangan dan Aset 	1 Laporan					<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Evaluasi Tematik Keuangan dan Aset 	1 Laporan		
			<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Optimalisasi Pendapatan Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 	4 Laporan					<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Optimalisasi Pendapatan Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 	4 Laporan		
			<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Pengelolaan Aset dan Persediaan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 	4 Laporan					<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Pengelolaan Aset dan Persediaan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 	4 Laporan		
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Review LPPD 	1 Laporan	8.991.250	2.1.3	Reviu Laporan Kinerja		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Review LPPD 	1 Laporan	8.991.250	
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Review LKPD Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 	1 laporan	7.500.000	2.1.4	Reviu Laporan Keuangan		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Review LKPD Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 	1 laporan	7.500.000	
2.1.5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan TLHP di Bidang Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Keuangan dan Aset - Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Pembangunan Sarana Prasarana 	2 laporan 2 Laporan 2 Laporan	28.000.000	2.1.5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan TLHP di Bidang Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Keuangan dan Aset - Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Pembangunan Sarana Prasarana 	2 laporan 2 Laporan 2 Laporan	28.000.000	

			<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Eksternal - Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal 	2 Laporan					<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Eksternal - Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal 	2 Laporan		
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Tersedianya Laporan/dokumen di Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Sarana dan Prasarana,Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100%	138.561.500	2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Tersedianya Laporan/dokumen di Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Sarana dan Prasarana,Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100%	138.561.500	
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		- Fasilitas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	1 Laporan	6.960.000	2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		- Fasilitas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	1 Laporan	6.960.000	

2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan ADTT Probitiy Audit Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Laporan ADTT Tematik, Dakel,dll Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Laporan ADTT Dais Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Laporan ADTT Probitiy Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - Laporan ADTT Dais Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - Laporan Probitiy Audit Bidang Pembangunan Sarana Prasarana - Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Pembangunan Sarana Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> 2 LHA 3 LHA 2 LHA 2 LHA 3 LHA 1 LHA 2 LHA 2 LHA 	131,601,500	2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan ADTT Probitiy Audit Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Laporan ADTT Tematik, Dakel,dll Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Laporan ADTT Dais Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Laporan ADTT Probitiy Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - Laporan ADTT Dais Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - Laporan Probitiy Audit Bidang Pembangunan Sarana Prasarana - Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Pembangunan Sarana Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> 2 LHA 3 LHA 2 LHA 2 LHA 3 LHA 1 LHA 2 LHA 2 LHA 	131,601,500	
-------	-----------------------------------	--	---	--	-------------	-------	-----------------------------------	--	---	--	-------------	--

			- Laporan ADTT Dais Bidang Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	2 LHA					- Laporan ADTT Dais Bidang Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	2 LHA		
			- Laporan ADTT Probity Audit Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat	2 LHA					- Laporan ADTT Probity Audit Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat	2 LHA		
			- Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	3 LHA					- Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	3 LHA		
			- Laporan ADTT Dais Bidang Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 LHA					- Laporan ADTT Dais Bidang Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 LHA		
			- Laporan Audit Investigasi Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	1 LHA					- Laporan Audit Investigasi Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	1 LHA		
			- Laporan Audit Investigasi Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2LHA					- Laporan Audit Investigasi Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2LHA		

			- Laporan Hasil Review PBJ Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	4 Laporan					- Laporan Hasil Review PBJ Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	4 Laporan		
			Laporan SPIP maturitas	1 Laporan					Laporan SPIP maturitas	1 Laporan		
			- Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	1 Laporan					- Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	1 Laporan		
			- Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan					- Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan		
			- Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan					- Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan		
			- Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	1 Laporan					- Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	1 Laporan		
			- Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD	1 Laporan					- Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD	1 Laporan		

			Laporan evaluasi pelaksanaan RTP	1 Laporan				Laporan evaluasi pelaksanaan RTP	1 Laporan		
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal dan Internal	0	354.815.960	3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal dan Internal	0	354.815.960	Reviu Tahun 2021 hanya ada 1 Indikator
			Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)					Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Tersedianya Laporan/dokumen di Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100%	67.196.000	3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersedianya Laporan/dokumen di Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100%	67.196.000	
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - Sistem Prosedur Pengawasan (MO, Kapabilitas APIP) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 	1 Dokumen 1 Dokumen	52.147.500	3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat - Sistem Prosedur Pengawasan (MO, Kapabilitas APIP) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 	1 Dokumen 1 Dokumen	52.147.500	

			- Dokumen SIM HP (Hasil Pengawasan) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen					- Dokumen SIM HP (Hasil Pengawasan) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen		
			- Laporan Review Juklak Evaluasi SAKIP Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan					- Laporan Review Juklak Evaluasi SAKIP Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan		
			- Laporan Review Juklak Review Laporan Kinerja Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan					- Laporan Review Juklak Review Laporan Kinerja Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan		
			- Laporan Peer Review Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan					- Laporan Peer Review Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan		
			- Laporan Peer Review Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan					- Laporan Peer Review Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan		
			- Laporan Peer Review Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	1 Laporan					- Laporan Peer Review Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	1 Laporan		
			- Laporan Peer Review Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan					- Laporan Peer Review Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan		

3.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		- Survey Penilaian Integritas (SPI) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 laporan	15.048.500	3.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		- Survey Penilaian Integritas (SPI) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 laporan	15.048.500	Biaya survey tahun 2022 dianggarkan oleh KPK.
3.2	Pendampingan dan Asistensi		Tersedianya Laporan/dokumen di Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100%	287.619.960	3.2	Pendampingan dan Asistensi		Tersedianya Laporan/dokumen di Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	100%	287.619.960	
3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		- Laporan Klinik Konsultasi - Laporan pendampingan MR OPD - Sosialisasi MR	1 Laporan 1 laporan 1 laporan	36.108.000	3.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		- Laporan Klinik Konsultasi - Laporan pendampingan MR OPD - Sosialisasi MR	1 Laporan 1 laporan 1 laporan	36.108.000	Ada penambahan output dari tahun sebelumnya yaitu pendampingan dan sosialisasi MR.

3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Reformasi Birokrasi - Laporan PMPRB Bidang Pemerintahan dan Aparatur 	<p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>	4,173,750	3.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Reformasi Birokrasi - Laporan PMPRB Bidang Pemerintahan dan Aparatur 	<p>1 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>	4,173,750	
3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan WBS Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Penelitian dan Penelaah Informasi (PPI) Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Saber Pungli Bidang Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Laporan Monitoring Center of Prevention (MCP) Bidang Pemerintahan dan Aparatur 	<p>2 Laporan</p> <p>12 Laporan</p> <p>11 Laporan</p> <p>2 Laporan</p>	217,211,610	3.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan WBS Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Penelitian dan Penelaah Informasi (PPI) Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Saber Pungli Bidang Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Laporan Monitoring Center of Prevention (MCP) Bidang Pemerintahan dan Aparatur 	<p>2 Laporan</p> <p>12 Laporan</p> <p>11 Laporan</p> <p>2 Laporan</p>	217,211,610	

3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		- Laporan Gratifikasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 Laporan	30,126,600	3.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		- Laporan Gratifikasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 Laporan	30,126,600	
			- Laporan Rekapitulasi Hasil Pemantauan LHKASN Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan					- Laporan Rekapitulasi Hasil Pemantauan LHKASN Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan		
			- Laporan Zona Integritas (ZI) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan					- Laporan Zona Integritas (ZI) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan		
			- Laporan Monev Benturan Kepentingan	1 Laporan					- Laporan Monev Benturan Kepentingan	1 Laporan		
			JUMLAH		10.226.746.723				JUMLAH		10.226.746.723	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Inspektorat tidak langsung berhubungan dengan usulan program atau kegiatan dari masyarakat, namun tugasannya selaku Instansi Pengawas yang juga terkait dengan pelayanan masyarakat yaitu : melakukan pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi, serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui pemeriksaan khusus atau investigatif dan sub kegiatan Penelitian Penelaahan Informasi dengan fokus dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan publik, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melakukan Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yaitu : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Lingkungan Hidup, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Perhubungan, bidang komunikasi dan Informatika, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Penanaman Modal, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang pemerintahan umum.

*) Mereview Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah dimana dalam kegiatan review tersebut diantaranya memperbandingkan kesesuaian Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang yang merupakan usulan dari masyarakat. Tabel 2.4 (nihil) tidak dibuat karena Inspektorat tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 380 : ayat (1) Bupati/walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) **dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.**

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan **audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan assistensi/pendampingan serta bimbingan teknis** dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasar Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrative, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (ayat (4)).

Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, kelembagaan Daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan Daerah kabupaten/kota, pembangunan Daerah kabupaten/kota, pelayanan public di Daerah kabupaten/kota, kerja sama Daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Kabupaten/Kota berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.

Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi focus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan usaha , tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Kegiatan, sasaran dan fokus pengawassan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan meliputi 5 (lima) jenis kegiatan yaitu :
 - a) Kegiatan peningkatan kapasitas APIP yaitu : bimbingan teknis pemeriksaan investigative, bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice), bimbingan teknis penerapan system manajemen risiko.
 - b) Kegiatan asistensi/pendampingan yaitu : penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah.
 - c) Kegiatan reviu meliputi : reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu Rebcana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa.

- d) Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, dana desa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP, penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan laporan gratifikasi, penanganan Whistle Blower System, penanganan benturan kepentingan, penilaian internal zona integritas, verifikasi LHKPN/LHKASN, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pelayanan publik .
- e) Kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan/audit kinerja dan pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu.

2. Fokus dan Sasaran Pengawasan :

- A. pengawasan umum dengan fokus dan sasaran:
 - a) pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - 1) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke pemerintah pusat;
 - 2) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota;
 - 3) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi; dan
 - 4) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
 - b) kelembagaan daerah, dengan sasaran:
 - 1) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 2) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c) kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:
 - 1) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan
 - 3) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - 4) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - 5) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.

- d) keuangan daerah, dengan sasaran:
 - 1) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - 2) tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - 3) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - 4) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 - 5) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - 6) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
- e) pembangunan daerah, dengan sasaran:
 - 1) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - 2) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
 - 3) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (*one map policy*).
- f) pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
 - 1) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - 2) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
 - 3) kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
- g) kerja sama daerah, dengan sasaran:
 - 1) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;
 - 2) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga; dan
 - 3) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- h) kebijakan daerah, dengan sasaran:
 - 1) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi evaluasi rancangan peraturan daerah, fasilitasi rancangan peraturan daerah, klarifikasi peraturan daerah, pemberian nomor register dan pembatalan peraturan kepala daerah;
 - 2) kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - 3) capaian program pembentukan peraturan daerah.
- i) kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan sasaran:
 - 1) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - 2) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- B. pengawasan teknis dengan fokus dan sasaran capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah, meliputi:
- a) urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 - b) urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - c) urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat ;
 - e) urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 - f) urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g) urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h) urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 - i) urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - j) urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - k) urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
 - l) urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - m) urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
 - n) urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
 - o) urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
 - p) urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
 - q) urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; dan
 - r) urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
- C. pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah difokuskan kepada:
- a) pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
 - 1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 2) pajak dan retribusi daerah;
 - 3) hibah dan bantuan sosial;
 - 4) belanja barang dan jasa;
 - 5) belanja modal; dan
 - 6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
 - b) pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan;
 - c) pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
 - d) pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.
- D. Inspektorat Daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan risiko dan kebutuhan pemerintah daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin akuntabel Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, semakin menurunnya penyimpangan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (early warning system).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat juga wajib melaksanakan asistensi, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta melaksanakan koordinasi dan sinergitas pengawasan terhadap pelaksanaan Rakorwasnas, Rakorwasda, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasar risk based audit plan, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Visi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan berpijak pada Nilai Keistimewaan” Pembentukan organisasi tentu mempunyai maksud dan tujuan yang merupakan arah kebijaksanaan yang harus ditempuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Misi berperan sebagai pemandu dalam tindakan manajemen yang diperlukan. Dengan perumusan Misi yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak maka segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dapat diarahkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan .

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :

- a. Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Kota
- b. Misi 2 : Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakatan
- c. Misi 3 : Memperkuat moral,etika dan budaya masyarakat kota Yogyakarta.
- d. Misi 4 : Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- e. Misi 5 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- f. Misi 6 : Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman
- g. Misi 7 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat mendukung pencapaian Misi ke-7.

a) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

- Tujuan untuk mendukung 2 cita dari 9 nawa cita yaitu cita 2 : membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta cita 4 yaitu memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dan salah satu prioritas tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Kinerja Aparatur Birokrasi dengan sasaran pembangunan yaitu : Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah meningkat.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi melaksanakan misi , memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis.

Tujuan Rencana Kerja SKPD (Organisasi Perangkat Daerah) Untuk mendukung misi ke 7 Walikota Yogyakarta, ini merupakan salah satu tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih .

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan , maka **Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah**

<p>“Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.”</p>

Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat telah tercapai atau belum maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). *Maturitas* (maturity) berarti dikembangkan penuh atau optimal.

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder.

Indikator tujuan untuk mengukur apakah maturitas sistem pengendalian internal pemerintah sudah meningkat yaitu dari :

**“Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)”**

Hasil penilaian dari BPKP terhadap pelaksanaan 5 unsur SPIP.

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi 5 unsur SPIP yaitu :

- a) Lingkungan pengendalian
- b) Penilaian Risiko
- c) Kegiatan pengendalian
- d) Informasi dan komunikasi
- e) Pemantauan pengendalian intern.

Level maturitas SPIP terdiri dari 6 (enam) tingkat:

- 1) Tingkat 0 untuk pemerintah daerah yang sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
- 2) Tingkat 1 (Rintisan)
- 3) Tingkat 2 (Berkembang)
- 4) Tingkat 3 (Terdefinisi)
- 5) Tingkat 4 (Terkelola dan terukur)
- 6) Tingkat 5 (Optimum) instansi telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan Sistem pengendalian intern pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Penjelasan 6 Tingkatan Maturitas SPIP yaitu :

- 1) Belum ada dengan nilai < 1 ; karakteristik : Lembaga/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.
- 2) Rintisan dengan nilai $1 < 2$; karakteristik : Ada praktek pengendalian intern namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
- 3) Berkembang dengan nilai $2 < 3$; karakteristik : L/Pemda telah melaksanakan praktek pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
- 4) Terdefinisi dengan nilai $3 < 4$; karakteristik: L/Pemda telah melaksanakan praktek pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
- 5) Terkelola dan terukur dengan nilai $4 < 4,5$: karakteristik L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personil pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan maupun tujuan Lembaga/Pemda Evaluasi formal dan terdokumentasi.
- 6) Optimum dengan nilai $4,5 < 5$: Lembaga/Pemda telah melaksanakan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi.

Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta tingkat level maturitas SPIP telah mencapai tingkat yang cukup baik yaitu tingkat 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,33 diharapkan nilai maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta dapat semakin meningkat dengan target akhir tahun pelaksanaan Renstra Tahun 2022 mencapai nilai 3,40. Tujuan dan indikator tujuan sudah tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

b) Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, pada tahun 2019 ada reviu renstra dengan diterbitkannya Perwal Kota Yogyakarta No. 44 Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 maka Sasaran Strategis Inspektorat menjadi, yaitu :

“ Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meningkat “

Untuk mengetahui atau mengukur apakah target sasaran Inspektorat telah tercapai atau belum maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus merupakan indikator kinerja sasaran untuk mengukur sasaran strategis Inspektorat, yaitu :

“Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”

Pada Renja Tahun 2022 target sasaran nilai maturitas SPIP adalah 3.40

Adapun cara atau formula pengukurannya sebagai berikut :

Hasil Penilaian (Monev.) BPKP terhadap 5 unsur SPIP yaitu : 1) lingkungan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi , dan 5) Pemantauan pengendalian intern) tk. Pem Kota Yk.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022.

Sebagai bahan pertimbangan untuk rumusan program dan kegiatan adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 dan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga dan keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 bahwa ada perubahan sesuai hasil review terhadap target sasaran dan program, serta RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun untuk penyusunan Program dan Kegiatan pada tahun 2022 Inspektorat Kota Yogyakarta berpedomanan pada nomenlatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

URUSAN	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
6					
6	01				
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
6	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
6	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
6	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6	01	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
6	01	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6	01	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
6	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6	01	01	2.03		Administrasi Umum
6	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6	01	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns
6	01	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
6	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
6	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

6	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6	01	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
6	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
6	01	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
6	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
6	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
6	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
6	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
6	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
6	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
6	01	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
6	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
6	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6	01	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
6	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6	01	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
6	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
6	01	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
6	01	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
6	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
6	01	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
6	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6	01				INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan
6	01	02	2.01	02	Reviuw Kinerja dan Keuangan
6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
6	01	02	2.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan
6	01	02	2.02	02	Reviu Kinerja dan Keuangan
6	01	02	2.02	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
6	01	02	2.02	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan

6	01	03			PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
6	01	03	2.02		Asistensi dan Pendampingan
6	01	03	2.02	01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
6	01	03	2.02	02	Asistensi dan Pendampingan

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat untuk Tahun 2022 ada 3 program, 10 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Bag PEP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Bag Keuangan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

1.3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			4 Bidang
2.1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irbn Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irbn Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
			Reviu Laporan Kinerja	Irbn Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			Reviu Laporan Keuangan	Irbn Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Irbn Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
2.2		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Irbn Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Irbn Bidang Pembangunan Sarana Prasarana
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
3.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Irbn Bid.Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Irbn Bidang Pemtur
3.2		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Irbn Bidang Pembangunan Sarana Prasarana
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Irbn Bidang Pemtur
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Irbn Bidang Pemtur
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Irbn Bidang Pemtur

Pada tahun 2021 dan 2022 Inspektorat Kota Yogyakarta jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan masih sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2022 dengan rencana anggaran sebesar Rp.10.226.746.723,- yang terdiri dari Belanja Gaji+TPP dan Non Gaji.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Yogyakarta, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan berdasarkan Kelembagaan yang baru sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan usulan anggaran Rp 9.564.289.903,-, sebagai penanggungjawabnya Sekretaris Inspektorat Kota Yogyakarta yang terdiri dari 3 kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rencana anggaran Rp.40.100.000,-
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana anggaran yang diusulkan Rp.8.412.526.295,-
 - c) Administrasi Umum Perangkat daerah dengan rencana anggaran yang diusulkan Rp.357.334.488,-
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rencana anggaran yang diusulkan Rp.198.100.000,-
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana anggaran yang diusulkan Rp.394.845.520,-
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana anggaran yang diusulkan Rp.161.383.600,-
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan rencana anggaran sebesar Rp.307.640.860,- sebagai penanggungjawab program ini 4 Irban di 4 Bidang Inspektorat Kota Yogyakarta yang terdiri dari 2 kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan rencana anggaran sebesar Rp.169.079.360,-
 - b) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan rencana anggaran Rp.138.561.500,-
3. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi dengan rencana anggaran Rp.354.815.960, sebagai penanggungjawab program ini 4 Irban di 4 Bidang Inspektorat Kota Yogyakarta yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan, dengan rencana anggaran Rp.67.196.000,-
 - b) Pendampingan dan Asistensi, dengan rencana anggaran Rp.287.619.960,-

Pendanaan dari tahun 2021 dibanding tahun 2022 mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar **Rp. 97.575.160,- atau sekitar 0,9%**. **Pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.10.129.171.563,- untuk rencana anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 10.226.746.723,-** adanya kenaikan dikarenakan adanya penyesuaian dengan Permendagri yang baru No. 90 Tahun 2019 dan juga adanya penambahan beberapa output kegiatan karena adanya mandatori dari pusat terkait beberapa reviu dan audit seperti reviu LPPD, audit penanganan covid, MCP KPKP, dll, pengadaan sarana prasarana seperti meja kursi, perbaikan ruang konsultasi agar lebih nyaman, pengadaan lapetope, sebagai pemenuhan evaluasi gubernur tahun yang lalu dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP, melakukan pendampingan Manajemen Resiko Pemkot, sosialisasi Manajemen Resiko, dalam rangka peningkatan nilai maturitas SPIP yang sempat turun 0,37.

Untuk lebih rinci Rencana Kerja dan Pendanaan, yaitu program dan target kinerja program, kegiatan dan target kinerja kegiatan, serta anggaran dan indikatornya telah tercantum pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Inspektorat Kota Yogyakarta disusun sesuai SE Walikota Yogyakarta No : 50/439/SE/2021 tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana (Tabel 4.1 sumber SIPD) sebagai berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Ketera ngan Priorit as Pembana ngan Nasion al				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						10,226,746,723	10,226,746,723					
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9,564,289,903	9,564,289,903					
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40,100,000	40,100,000					
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan 2022 dan Review Renstra OPD Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	3 Dokumen 1 Berita Acara			2,000,000	2,000,000	
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen			3,500,000	3,500,000	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I,II,III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan , Pelaksanaan Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Pengelolaan Website OPD Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	6 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen			34,100,000	34,100,000	

6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi SAKIP)	1 Dokumen			500,000	500,000	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8,412,526,295	8,412,526,295	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Gaji dan Tunjangan ASN TPP/Tukin 1 Tahun	64 ASN 64 ASN			8,408,048,295	8,408,048,295	
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen			500,000	500,000	
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen			500,000	500,000	
6	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Akuntansi dan Pelaporan : Neraca, LRA, LO, LPE, CALK	12 Dokumen			498,000	498,000	
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			500,000	500,000	
6	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Bahan tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 Dokumen			180,000	180,000	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	laporan keuangan	12 Dokumen			1,800,000	1,800,000	
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			500,000	500,000	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										357,334,488	357,334,488	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis			4,340,000	4,340,000	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Alat Tulis Kantor Bahan kantor, bahan suku cadang komputer Drum Flashdisk Hard disk internal	67 jenis 14 jenis 53 buah 15 buah 2 Unit 7 jenis			65,088,488	65,088,488	

										Kertas dan cover (HVS) Keyboard Komputer Supply Mouse UBS Peralatan Rumah Tangga/Kamntor () Pengharum Mobil, Bendera) Power Supply RAM 2 GIGA Refil Tinta Refil Toner Laser Jet Retribusi Kebersihan Suku Cadang komputer /Laptop Toner HP	5 unit 1 Unit 5 buah 16 jenis 2 unit 1 Unit 12 buah 50 buah 1 jenis 5 Unit 4 buah						
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Barang Cetak dan Penggandaan surat-surat/dokumen	6 jenis 100000 lembar			32,110,000	32,110,000	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Buku Perundang-undangan Surat kabar selama 12 bulan	10 buku 2 jenis			5,260,000	5,260,000	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Makan minum rapat Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (dalam Jawa) Rapat koordinasi dan konsultasi luar Jawa SPPD Uji Materi	162 OS 13 kali 5 kali 3 kali 5 kali			250,536,000	250,536,000	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										198,100,000	198,100,000	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Hard server Kursi kerja Kursi kerja Eselon III Kursi tamu Laptop PC Komputer All in One Pembuatan Back Drop Lantai IV Peningkatan ruang konsultasi Penyekatan ruang rapat lantai 3 Printer Printer warna UPS	1 unit 18 unit 2 unit 1 unit 5 unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit			198,100,000	198,100,000	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										394,845,520	394,845,520	

6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Materai Pengiriman dokumen Surat keluar Surat masuk	550 lembar 37 dokumen 1.769 surat 5.385 surat			8,497,000	8,497,000	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	12 bulan 12 Bulan			6,600,000	6,600,000	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Jasa cleaning service Jasa tenaga keamanan Penyediaan jasa tenaga naban Penyediaan jasa tenaga teknis Sewa alat mesin fotocopy Sewa/pemeliharaan taman	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan			379,748,520	379,748,520	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										161,383,600	161,383,600	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	13 unit 6 unit 13 unit 6 unit			104,223,600	104,223,600	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	13 unit 6 unit			9,900,000	9,900,000	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	AC Split BBM Genset Komputer Laptop Pemeliharaan filling kabinet Pemeliharaan kursi lipat Printer Service/Perbaikan Sumur	32 unit 240 liter 8 unit 8 unit 5 unit 5 unit 7 unit 3 kali			22,260,000	22,260,000	

6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Pemeliharaan Gedung/Kantor	2 unit			25,000,000	25,000,000	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										307,640,860	307,640,860	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal										169,079,360	169,079,360	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91 %	Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Laporan Audit Kinerja Laporan Audit Operasional Laporan Evaluasi SAKIP Laporan Review Dokumen Perencanaan Daerah	1 Dokumen 8 LHA 8 LHA 42 LHE 4 Laporan			79,588,110	79,588,110	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91 %	Laporan Review Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah Laporan Review Penyerapan Anggaran Pemantauan Optimalisasi Pajak Daerah Pemantauan Pengelolaan Aset dan Persediaan Review DAK Fisik Review/Evaluasi Tematik Keuangan / Aset	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 18 Laporan 1 Laporan			45,000,000	45,000,000	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91 %	Laporan Review LPPD	1 Laporan			8,991,250	8,991,250	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan	91 %	Laporan Hasil Review LKPD	1 Laporan			7,500,000	7,500,000	

								aparatur									
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91 %	Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	1 Dokumen 2 Laporan 8 Laporan			28,000,000	28,000,000	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										138,561,500	138,561,500	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91 %	Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	1 Laporan			6,960,000	6,960,000	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91 %	Laporan ADTT Dais Laporan ADTT Probyty Audit Laporan ADTT Tematik/Dakel/dil Laporan Evaluasi Pelaksanaan RTP Laporan MonitoringPengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Laporan SPIP Maturitas	3 LHA 5 LHA 7 LHA 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			131,601,500	131,601,500	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										354,815,960	354,815,960	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										67,196,000	67,196,000	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	91 %	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan(PKPT) Dokumen SIM HP (Hasil Pengawasan) Laporan Peer Review Laporan Review Juklak Evaluasi SAKIP Sistem Prosedur Pengawasan (MO, Kapabilitas APIP, Larwasda, Statistik)	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen			52,147,500	52,147,500	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	91 %	Survey Penilaian Integritas (SPI)	1 Laporan			15,048,500	15,048,500	

6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi								287,619,960	287,619,960		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	91 %	Laporan Klinik Konsultasi Laporan Pendampingan MR Pemkot Sosialisasi MR	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			36,108,000	36,108,000
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	91 %	Evaluasi Reformasi Birokrasi Laporan PMPRB	1 Laporan 1 Laporan			4,173,750	4,173,750
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	91 %	Laporan Monitoring Center of Prevention (MCP) Laporan Saber Pungli Laporan WBS Penelitian dan Penelaahan Informasi	2 Laporan 11 Laporan 2 Laporan 12 Laporan			217,211,610	217,211,610
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	91 %	Laporan Gratifikasi Laporan Monev Benturan Kepentingan Laporan Rekapitulasi Hasil Pemantauan LHKASN Laporan Zona Integritas (ZI)	2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			30,126,600	30,126,600
TOTAL												10,226,746,723	10,226,746,723			

Sumber data : <https://jogjakota.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/plan/lampiran/2022/rkpd/1>

Kebutuhan anggaran rencana kerja tahun 2022 setelah adanya sinkronisasi Renja Perangkat Daerah dengan kemampuan keuangan Daerah pada tanggal 15 April 2021 membutuhkan anggaran semula sebesar Rp **10,226,746,723,-** menjadi Rp **13.251.008.773,-** adanya penambahan anggaran gaji informasi di awal bulan Mei 2021, di awal bulan Juli 2021 ada informasi lagi dari TAPD ada perubahan kenaikan gaji untuk tahun 2022 CPNS ke PNS dan tambahan 3 CPNS STAN, namun anggaran Non Gaji tetap berkurang sebesar Rp.86,356,000,- pada pengurangan belanja kursi dan lapetope, maka anggaran Renja 2022 menjadi Rp **13,226,101,644,-** sesuai Tabel 4.1 sebai berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Daerah

Sinkronisasi Renja Perangkat Daerah 2022 dengan Kemampuan Keuangan Daerah 15 April 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Sebelum Sinkronisasi (Rp.)	Pagu Indikatif Setelah Sinkronisasi (Rp.)	Keterangan Anggaran 2021 : 10.129.171.563					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						10,226,746,723	13.251.008.773	- Ada tambahan anggaran gaji CPNS ke PNS dan 3 CPNS STAN Rp. 3.110.618.050 - Anggaran Non Gaji Berkurang Rp.86,356,000					
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9,564,289,903	12.589.307.953						
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40,100,000	40,100,000						
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	- Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan 2022 dan Review Renstra OPD - Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	3 Dokumen 1 Berita Acara				2,000,000	2,000,000	
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	- RKA dan RKPA OPD,DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen				3,500,000	3,500,000	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	- Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I,II,III Tahun 2022 - Dokumen Evaluasi Kebijakan , Pelaksanaan Hasil Renstra OPD - Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	6 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan				34,100,000	34,100,000	

										<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja OPD - Pengelolaan Website OPD - Penyediaan Jasa Tenaga Teknis - Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi - Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja 	12 Bulan										
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi SAKIP)	1 Dokumen				500,000	500,000				
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											8,412,526,295	11.523.144.345				
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Gaji dan Tunjangan ASN TPP/Tukin 1 Tahun	64 ASN 64 ASN				8,408,048,295	11,518,666,345			Ada tambahan anggaran gaji CPNS ke PNS dan 3 CPNS STAN Rp.3.110.618.050	
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen				500,000	500,000				
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen				500,000	500,000				
6	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Akuntansi dan Pelaporan : Neraca, LRA, LO, LPE, CALK	12 Dokumen				498,000	498,000				
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen				500,000	500,000				
6	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Bahan tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 Dokumen				180,000	180,000				

6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	laporan keuangan	12 Dokumen			1,800,000	1,800,000	
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			500,000	500,000	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										357,334,488	357,334,488	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis			4,340,000	4,340,000	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Alat Tulis Kantor Bahan kantor, bahan suku cadang komputer Drum Flashdisk Hard disk internal Kertas dan cover (HVS) Keyboard Komputer Supply Mouse UBS Peralatan Rumah Tangga/Kamntor (Pengharum Mobil, Bendera) Power Supply RAM 2 GIGA Refil Tinta Refil Toner Laser Jet Retribusi Kebersihan Suku Cadang komputer/Laptop Toner HP	67 jenis 14 jenis 53 buah 15 buah 2 Unit 7 jenis 5 unit 1 Unit 5 buah 16 jenis 2 unit 1 Unit 12 buah 50 buah 1 jenis 5 Unit 4 buah			65,088,488	65,088,488	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Barang Cetak dan Penggandaan surat-surat/dokumen	6 jenis 100000 lembar			32,110,000	32,110,000	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Buku Perundang-undangan Surat kabar selama 12 bulan	10 buku 2 jenis			5,260,000	5,260,000	

6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Makan minum rapat Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (dalam Jawa) Rapat koordinasi dan konsultasi luar Jawa SPPD Uji Materi	162 OS 13 kali 5 kali 3 kali 5 kali			250,536,000	250,536,000	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										198,100,000	112,500,000	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Hard server Kursi kerja Kursi kerja Eselon III Kursi tamu Laptop PC Komputer All in One Pembuatan Back Drop Lantai IV Peningkatan ruang konsultasi Penyekatan ruang rapat lantai 3 Printer Printer warna UPS	1 unit 18 unit 2 unit 1 unit 5 unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 unit 1 unit 4 unit			198,100,000	112,500,000	Untuk sinkronisasi ada pengurangan anggaran : Kursi kerja, kursi kerja Es. III dan Lape Tope utk di Delet (di anggarkan di perubahan) Berkurang Rp.85.600.000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										394,845,520	394,845,520	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Materai Pengiriman dokumen Surat keluar Surat masuk	550 lembar 37 dokumen 1.769 surat 5.385 surat			8,497,000	8,497,000	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	12 bulan 12 Bulan			6,600,000	6,600,000	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Jasa cleaning service Jasa tenaga keamanan Penyediaan jasa tenaga naban Penyediaan jasa tenaga teknis Sewa alat mesin fotocopy Sewa/pemeliharaan taman	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan			379,748,520	379,748,520	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										161,383,600	161,383,600	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pembayaran pajak kendaraan perorangan	13 unit 6 unit 13 unit 6 unit			104,223,600	104,223,600	

										dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4								
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	13 unit 6 unit				9,900,000	9,900,000	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	AC Split BBM Genset Komputer Laptop Pemeliharaan filling kabinet Pemeliharaan kursi lipat Printer Service/Perbaikan Sumur	32 unit 240 liter 8 unit 8 unit 5 unit 5 unit 7 unit 3 kali				22,260,000	22,260,000	
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %	Pemeliharaan Gedung/Kantor	2 unit				25,000,000	25,000,000	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										307,640,860	317,683,360		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal										169,079,360	179,121,860		
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91 %	Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Laporan Audit Kinerja Laporan Audit Operasional Laporan Evaluasi SAKIP Laporan Review Dokumen Perencanaan Daerah	1 Dokumen 8 LHA 8 LHA 42 LHE 4 Laporan				79,588,110	89,630,610	Ada penambahan anggaran Rp.6.496.000 utk Reviu.

6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91 %	Laporan Review Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah Laporan Review Penyerapan Anggaran Pemantauan Optimalisasi Pajak Daerah Pemantauan Pengelolaan Aset dan Persediaan Review DAK Fisik Review/Evaluasi Tematik Keuangan / Aset	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 18 Laporan 1 Laporan				45,000,000	45,000,000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91 %	Laporan Review LPPD	1 Laporan				8,991,250	8,991,250
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91 %	Laporan Hasil Review LKPD	1 Laporan				7,500,000	7,500,000

6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91 %	Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	1 Dokumen 2 Laporan 8 Laporan				28,000,000	28,000,000	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										138,561,500	138,561,500		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91 %	Faslitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	1 Laporan				6,960,000	6,960,000	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91 %	Laporan ADTT Dais Laporan ADTT Probit Audit Laporan ADTT Tematik/Dakel/dll Laporan Evaluasi Pelaksanaan RTP Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Laporan SPIP Maturitas	3 LHA 5 LHA 7 LHA 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan				131,601,500	131,601,500	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										354,815,960	354,815,960		
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										67,196,000	67,196,000		

6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	91 %	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Dokumen SIM HP (Hasil Pengawasan) Laporan Peer Review Laporan Review Juklak Evaluasi SAKIP Sistem Prosedur Pengawasan (MO, Kapabilitas APIP, Larwasda, Statistik)	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen			52,147,500	52,147,500	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan				Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	91 %	Survey Penilaian Integritas (SPI)	1 Laporan			15,048,500	15,048,500	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi										287,619,960	287,619,960	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	91 %	Laporan Klinik Konsultasi Laporan Pendampingan MR Pemkot Sosialisasi MR	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			36,108,000	36,108,000	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	91 %	Evaluasi Reformasi Birokrasi Laporan PMPRB	1 Laporan 1 Laporan			4,173,750	4,173,750	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	91 %	Laporan Monitoring Center of Prevention (MCP) Laporan Saber Pungli Laporan WBS Penelitian dan Penelaahan Informasi	2 Laporan 11 Laporan 2 Laporan 12 Laporan			217,211,610	217,211,610	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	91 %	Laporan Gratifikasi Laporan Monev Benturan Kepentingan Laporan Rekapitulasi Hasil Pemantauan LHKASN Laporan Zona Integritas (ZI)	2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			30,126,600	30,126,600	
TOTAL															10,226,746,723	13.251.008.773	

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi i Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan n Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	0						13,226,101,644						13,251,008,773				
6	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	(Nilai >80 s.d 90)		(Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12,543,194,036		A (Nilai >80 s.d 90)	12,589,307,953		
6	0	0	2.0			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	%		%	0 %	40,100,000		0 %	40,100,000		
6	01	01	2.0	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan 2022 dan Review Renstra OPD Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah				3 Dokumen 1 Berita Acara	2,000,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo , Muja Muju	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	3 Dokumen 1 Berita Acara	2,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.0	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD				4 Dokumen	3,500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo , Muja Muju	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	4 Dokumen	3,500,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.0	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I,II,III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan , Pelaksanaan Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Pengelolaan Website OPD Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi				6 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	34,100,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo , Muja Muju	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	6 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	34,100,000	Inspektorat Daerah

						Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja													
6	01	01	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi SAKIP)				1 Dokumen	500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo , Muja Muju				Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	1 Dokumen	500,000	Inspektorat Daerah
6	0	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	%		%	0 %	11,523,144,345						0 %	11,523,144,345	
6	01	01	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN TPP/Tukin 1 Tahun				64 ASN 64 ASN	11,518,666,345	Kota Yogyakarta, Umbulharjo , Muja Muju				Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	64 ASN 64 ASN	11,518,666,345	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo , Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	3 Dokumen	500,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban				3 Dokumen	500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo , Muja Muju				Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	3 Dokumen	500,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.0	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan : Neraca, LRA, LO, LPE, CALK				12 Dokumen	498,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo , Muja Muju				Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	12 Dokumen	498,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo , Muja Muju				Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	1 Dokumen	500,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.0	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD				1 Dokumen	180,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo , Muja Muju				Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	1 Dokumen	180,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan keuangan				12 Dokumen	1,800,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo , Muja Muju				Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	12 Dokumen	1,800,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.0	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	500,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo , Muja Muju				Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	1 Dokumen	500,000	Inspektorat Daerah

6	01	01	2.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	%		%	0 %	363,860,987					0 %	357,334,488		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6 jenis	3,610,000					Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	6 jenis	4,340,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Bahan kantor, bahan suku cadang komputer Drum Flashdisk Hard disk internal Kertas dan cover (HVS) Keyboard Komputer Supply Mouse UBS Peralatan Rumah Tangga/Kamntor (Pengharum Mobil, Bendera) Power Supply RAM 2 GIGA Refil Tinta Refil Toner Laser Jet Retribusi Kebersihan Suku Cadang komputer/Laptop Toner HP				67 jenis 14 jenis 53 buah 15 buah 2 Unit 7 jenis 5 unit 1 Unit 5 buah 16 jenis 2 unit 1 Unit 12 buah 50 buah 1 jenis 5 Unit 4 buah	77,734,487				Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	67 jenis 14 jenis 53 buah 15 buah 2 Unit 7 jenis 5 unit 1 Unit 5 buah 16 jenis 2 unit 1 Unit 12 buah 50 buah 1 jenis 5 Unit 4 buah	65,088,488	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak Penggandaan surat-surat/dokumen				6 jenis 100000 lembar	32,087,500					Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	6 jenis 100000 lembar	32,110,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Perundang-undangan Surat kabar selama 12 bulan				10 buku 2 jenis	5,205,000					Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	10 buku 2 jenis	5,260,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum rapat Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (dalam Jawa) Rapat koordinasi dan konsultasi luar Jawa SPPD Uji Materi				162 OS 13 kali 5 kali 3 kali 5 kali	245,224,000					Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	162 OS 13 kali 5 kali 3 kali 5 kali	250,536,000	Inspektorat Daerah

6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	%		%	0 %	40,853,000					0 %	112,500,000	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hard server Kursi tamu PC Komputer All in One Pembuatan Back Drop Lantai IV Peningkatan ruang konsultasi Penyekatan ruang rapat lantai 3 Printer Printer warna UPS				1 unit 1 unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 unit 1 unit 4 unit	40,853,000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	1 unit 1 unit 2 Unit 1 Unit 1 unit 1 unit 4 unit	112,500,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	%		%	0 %	389,297,704					0 %	394,845,520	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Pengiriman dokumen Surat keluar Surat masuk				550 lembar 37 dokumen 1.769 surat 5.385 surat	8,497,000				Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	550 lembar 37 dokumen 1.769 surat 5.385 surat	8,497,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon				12 bulan 12 Bulan	6,600,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	12 bulan 12 Bulan	6,600,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa cleaning service Jasa tenaga keamanan Penyediaan jasa tenaga naban Penyediaan jasa tenaga teknis Sewa alat mesin fotocopy Sewa/pemeliharaan taman				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	374,200,704	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	379,748,520	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	%		%	0 %	185,938,000					0 %	161,383,600	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pembayaran pajak				13 unit 6 unit 13 unit 6 unit	54,318,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	13 unit 6 unit 13 unit 6 unit	104,223,600	Inspektorat Daerah

						kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4											
6	01	01	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4			13 unit 6 unit	84,110,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	13 unit 6 unit	9,900,000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Split BBM Genset Komputer Laptop Pemeliharaan filling kabinet Pemeliharaan kursi lipat Printer Service/Perbaikan Sumur		32 unit 240 liter 8 unit 8 unit 5 unit 5 unit 7 unit 3 kali	22,510,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	32 unit 240 liter 8 unit 8 unit 5 unit 5 unit 7 unit 3 kali	22,260,000	Inspektorat Daerah		
6	01	01	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung/Kantor		2 unit	25,000,000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	2 unit	25,000,000	Inspektorat Daerah		
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang	%	%	91 %	301,671,508			91 %	317,683,360			

							Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat														
6	01	02	2.01	01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	%		%	91 %	179,231,428					91 %	179,121,860		
6	01	02	2.01	01			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Laporan Audit Kinerja Laporan Audit Operasional Laporan Evaluasi SAKIP Laporan Review Dokumen Perencanaan Daerah				1 Dokumen 8 LHA 8 LHA 42 LHE 4 Laporan	89,630,610	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	1 Dokumen 8 LHA 8 LHA 42 LHE 4 Laporan	89,630,610	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	02			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Review Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah Laporan Review Penyerapan Anggaran Pemantauan Optimalisasi Pajak Daerah Pemantauan Pengelolaan Aset dan Persediaan Review DAK Fisik Review/Evaluasi Tematik Keuangan / Aset				4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 18 Laporan 1 Laporan	44,740,818	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 18 Laporan 1 Laporan	45,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	03			Reviu Laporan Kinerja	Laporan Review LPPD				1 Laporan	8,991,250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	1 Laporan	8,991,250	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	04			Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Review LKPD				1 Laporan	7,887,500					0	1 Laporan	7,500,000	Inspektorat Daerah

6	01	02	2.0 1	0 7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal				1 Dokumen 2 Laporan 8 Laporan	27,981,250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	1 Dokumen 2 Laporan 8 Laporan	28,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.0 2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	%		%	91 %	122,440,080					91 %	138,561,500	
6	01	02	2.0 2	0 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)				1 Laporan	6,960,000				0	1 Laporan	6,960,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.0 2	0 2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan ADTT Dais Laporan ADTT Probit Audit Laporan ADTT Tematik/Dakel/dll Laporan Evaluasi Pelaksanaan RTP Laporan MonitoringPengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Laporan SPIP Maturitas				3 LHA 5 LHA 7 LHA 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	115,480,080				0	3 LHA 5 LHA 7 LHA 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	131,601,500	Inspektorat Daerah
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-		-	level 3 (untuk 6 elemen penilaian) -	381,236,100					level 3 (untuk 6 elemen penilaian) -	344,017,460	
6	01	03	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	Level		Level	3 Level	56,397,400					3 Level	56,397,500	
6	01	03	2.0 1	0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Dokumen SIM HP (Hasil Pengawasan) Laporan Peer Review Laporan Review Juklak Evaluasi				1 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen	41,349,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen	41,349,000	Inspektorat Daerah

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01	INSPEKTORAT DAERAH															
6	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										40,100,000	40,100,000		
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan 2022 dan Review Renstra OPD Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen 1 Berita Acara	100 %	2,000,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2,000,000
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD	Dukungan ketercapaian Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Dokumen	100 %	3,500,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3,500,000
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I,II,III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan , Pelaksanaan Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Pengelolaan Website OPD Penyediaan Jasa Tenaga Teknis	Dukungan ketercapaian Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	6 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	100 %	34,100,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	34,100,000

						Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja												
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi SAKIP)	Dukungan ketercapaian Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	500,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	500,000
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										11,523,144,345				11,523,144,345
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gaji dan Tunjangan ASN TPP/Tukin 1 Tahun	Dukungan ketercapaian Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	64 ASN 64 ASN	100 %	11,518,666,345			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	11,518,666,345
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen	100 %	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	500,000
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	Dukungan ketercapaian Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen	100 %	500,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	500,000
6	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Akuntansi dan Pelaporan : Neraca, LRA, LO, LPE, CALK	Dukungan ketercapaian Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	100 %	498,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	498,000
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan ketercapaian Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	500,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	500,000
6	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	Dukungan ketercapaian Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	180,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	180,000
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	laporan keuangan	Dukungan ketercapaian Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	100 %	1,800,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,800,000
6	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	500,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	500,000
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										363,860,987			357,334,488	

6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Perangkat Daerah		A (Nilai >80 s.d 90)	6 jenis	100 %	3,610,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	4,340,000
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat Tulis Kantor Bahan kantor, bahan suku cadang komputer Drum Flashdisk Hard disk internal Kertas dan cover (HVS) Keyboard Komputer Supply Mouse UBS Peralatan Rumah Tangga/Kamntor (Pengharum Mobil, Bendera) Power Supply RAM 2 GIGA Refil Tinta Refil Toner Laser Jet Retribusi Kebersihan Suku Cadang komputer/Laptop Toner HP	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Perangkat Daerah		A (Nilai >80 s.d 90)	67 jenis 14 jenis 53 buah 15 buah 2 Unit 7 jenis 5 unit 1 Unit 5 buah 16 jenis 2 unit 1 Unit 12 buah 50 buah 1 jenis 5 Unit 4 buah	100 %	77,734,487			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	65,088,488
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang Cetak Penggandaan surat-surat/dokumen	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Perangkat Daerah		A (Nilai >80 s.d 90)	6 jenis 100000 lembar	100 %	32,087,500			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	32,110,000
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Buku Perundang-undangan Surat kabar selama 12 bulan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Perangkat Daerah		A (Nilai >80 s.d 90)	10 buku 2 jenis	100 %	5,205,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5,260,000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Makan minum rapat Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (dalam Jawa) Rapat koordinasi dan konsultasi luar Jawa SPPD Uji Materi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Perangkat Daerah		A (Nilai >80 s.d 90)	162 OS 13 kali 5 kali 3 kali 5 kali	100 %	245,224,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	250,536,000
6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										40,853,000			112,500,000	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hard server Kursi tamu PC Komputer All in One Pembuatan Back Drop	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	1 unit 1 unit 2 Unit 1 Unit	100 %	40,853,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	112,500,000

							Lantai IV Peningkatan ruang konsultasi Penyekatan ruang rapat lantai 3 Printer Printer warna UPS				1 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit								
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						389,297,704								394,845,520
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Materai Pengiriman dokumen Surat keluar Surat masuk	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Perangkat Daerah		A (Nilai >80 s.d 90)	550 lembar 37 dokumen 1.769 surat 5.385 surat	100 %	8,497,000				Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	8,497,000
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan 12 Bulan	100 %	6,600,000				Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	6,600,000
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jasa cleaning service Jasa tenaga keamanan Penyediaan jasa tenaga naban Penyediaan jasa tenaga teknis Sewa alat mesin fotocopy Sewa/pemeliharaan taman	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	374,200,704				Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	379,748,520
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						185,938,000							161,383,600	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	13 unit 6 unit 13 unit 6 unit	100 %	54,318,000				Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	104,223,600

6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	13 unit 6 unit	100 %	84,110,000	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	9,900,000
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	AC Split BBM Genset Komputer Laptop Pemeliharaan filling kabinet Pemeliharaan kursi lipat Printer Service/Perbaikan Sumur	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	32 unit 240 liter 8 unit 8 unit 5 unit 5 unit 7 unit 3 kali	100 %	22,510,000	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	22,260,000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pemeliharaan Gedung/Kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	2 unit	100 %	25,000,000	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	25,000,000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											317,683,360
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal											179,121,860
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparaturn dan Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Laporan Audit Kinerja Laporan Audit Operasional Laporan Evaluasi SAKIP Laporan Review Dokumen Perencanaan Daerah	Tersediannya Dokumen dan Laporan hasil pengawasan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	1 Dokumen 8 LHA 8 LHA 42 LHE 4 Laporan	100 %	89,630,610	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparaturn dan Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91 %	89,630,610

6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan Review Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah Laporan Review Penyerapan Anggaran Pemantauan Optimalisasi Pajak Daerah Pemantauan Pengelolaan Aset dan Persediaan Review DAK Fisik Review/Evaluasi Tematik Keuangan / Aset	Tersediannya Dokumen dan Laporan hasil pengawasan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 18 Laporan 1 Laporan	100 %	44,740,818		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91 %	45,000,000
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan Review LPPD	Tersediannya Dokumen dan Laporan hasil pengawasan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	1 Laporan	100 %	8,991,250		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91 %	8,991,250
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset,	Laporan Hasil Review LKPD	Tersediannya Dokumen dan Laporan hasil pengawasan		91 %	1 Laporan	100 %	7,887,500		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset, Bidang Pembangunan	91 %	7,500,000

					Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat								Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat			
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparat, Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	Tersediannya Dokumen dan Laporan hasil pengawasan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 %	1 Dokumen 2 Laporan 8 Laporan	100 %	27,981,250	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparat, Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91 %	28,000,000
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									122,440,080	138,561,500		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparat, Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi	Faslitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Tersediannya Dokumen dan Laporan Hasil Pengawasan		91 % 91 % 91 %	1 Laporan	100 %	6,960,000	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparat, Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak	91 % 91 % 91 %	6,960,000

					hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset								lanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset		
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Sarana dan Prasarana; Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur								Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur		
					Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal								Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal		
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	<p>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset, Bidang Pembangunan Sarana dan</p> <p>Laporan ADTT Dais Laporan ADTT Probitiy Audit Laporan ADTT Tematik/Dakel/dll Laporan Evaluasi Pelaksanaan RTP Laporan MonitoringPengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Laporan SPIP Maturitas</p>	<p>Tersdiannya Dokumen dan Laporan Hasil Pengawasan</p>	<p>91 % 91 % 91 % 91 %</p>	<p>3 LHA 5 LHA 7 LHA 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan</p>	<p>100 %</p>	<p>115,480,080</p>	<p>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset, Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian</p>	<p>91 % 91 % 91 % 91 %</p>	<p>131,601,500</p>	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2022 ini kemungkinan masih mengalami perubahan karena masih ada proses desk Renja dan evaluasi Gubernur yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat tahun 2017-2022 juga menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022, Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk tindak lanjut program dan kegiatan.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD, disesuaikan dengan visi misi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022. Berdasarkan analisa program dan kegiatan, kebutuhan anggaran rencana kerja tahun 2022 setelah adanya sinkronisasi Renja Perangkat Daerah dengan kemampuan keuangan Daerah pada tanggal 15 April 2021 membutuhkan anggaran semula sebesar Rp 10,226,746,723,- menjadi Rp.10.140.390.723,- namun di awal bulan Juli 2021 ada informasi dari TAPD bahwa ada kenaikan gaji untuk tahun 2022 maka anggaran menjadi Rp.13.226.101.644,-

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun 2022, yang akan memuat indikator maupun penjabaran pagu anggaran yang lebih terinci.

Demikian rencana kerja tahun 2022 yang merupakan akhir Renstra, semoga menjadi manfaat bagi semuanya, Aamiin.

Yogyakarta, 26 Juli 2021

Inspektorat Kota Yogyakarta
Inspektur

Drs. MARYOTO, M.M. ➔
NIP. 19610801 198503 1 010 †



LAMPIRAN BERITA ACARA



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦪꦏꦠ

Jalan Kenari No. 51 Yogyakarta Kode Pos : 55165, Telepon (0274) 371977 Fax 371977

E-MAIL : inspektorat@jogjakota.go.idHOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E-MAIL : upik@jogjakota.go.idWEBSITE : www.jogjakota.go.id

BERITA ACARA
Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Inspektorat
Kota Yogyakarta

Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (*Makmun, SM*).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta terhadap materi yang dipaparkan, maka pada :

Hari dan Tanggal : 23 Februari 2021.

J a m : 13.00 WIB-selesai

Tempat : Ruang Rapat Inspektorat Kota Yogyakarta

Forum Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Yogyakarta

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah;
- KEDUA** : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA** : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta ini;
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kota Tahun 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, tanggal 23 Februari 2021

Pimpinan Sidang



Drs. MARYOTO, MM

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta :

No.	Nama	Jabatan/Instansi/Bidang	Tandatangan
1.	Drs. MARYOTO, MM	Inspektur Kota Yogyakarta	
	SUHARTININGSIH, SH	Sekretaris Inspektorat Kota Yogyakarta	
2.	MAKMUN, SM	Ka Sub Bag PEP Inspektorat Kota Yogyakarta	
3.	ZUZINUL HUDA, S.E.	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Yogyakarta	
4.	YOHANES YOSEF WEA, S.T.	Ka Sub Keuangan Inspektorat Kota Yogyakarta	
5.	ANNA KRISMANAWATI, S.E.	Irban Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Kota Yogyakarta	
6.	SUTRISNO, SE	Pengendali Teknis Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Kota Yogyakarta	
7.	Ir. PUJIHASTUTI, M.T.	Irban Bidang Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Yogyakarta	
8.	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si	Irban Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Kota Yogyakarta	
9.	AMBAR HERAWATI, ST	Analisis Program dan Kegiatan Sub Bag PEP Inspektorat Kota Yogyakarta	

Lampiran III

Usulan yang disepakati dalam Forum/usulan yang disampaikan dalam forum dan disepakati untuk ditindaklanjuti perangkat daerah di tahun 2022, ada 4 Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

1. Kegiatan Audit
 - Audit Kinerja
 - Audit Operasional
 - Audit Dengan Tujuan Tertentu
 - Audit Investigasi, Riksus dan PFI.
2. Kegiatan Reviu
 - Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
 - Reviu Laporan Kinerja (LKj)
 - Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran
 - Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 - Reviu Pengelolaan Aset dan persediaan
 - Peer Reviu
 - Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - Reviu Penyerapan Anggaran (PA)
 - Reviu Pengadaan Barang Jasa (PB.J)
 - Reviu ASEB
 - Reviu Juklak LKj, Juklak SAKIP
 - Kegiatan Reviu lain.
3. Kegiatan Asistensi/Pendampingan
 - Penyuaunan dokumen perencanaan dan penganggaran
 - Pengadaan barang dan jasa
 - Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar (Saberpungli)
 - Pengawasan dan pengsamanan pemerintahan dan pembangunan daerah
 - Pendampingan SPIP atau Penyusunan RTP.
 - Klinik Konsultasi
 - Asistensi dan pendampingan lainnya.

4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

- Monitoring PBJ
- Monitoring Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Monitoring Aksi Pencegahan Korupsi.
- Monitoring Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- Monitoring Penanganan laporan gratifikasi
- Monitoring Penanganan *Whistle Blower System*(WBS)
- Monitoring Penanganan benturan kepentingan
- Monitoring Penilaian internal Zona Integritas (ZI)
- Monitoring Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) / Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Monitoring Pelayanan publik
- Monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
- Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi lainnya